

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT DAERAH



IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

SEMESTER 1 TAHUN 2025

Nomor : 700/138/11/M

Tanggal : 31 Juli 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten pada Semester 1 Tahun Anggaran 2025 ini disusun dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Laporan ini menggambarkan kegiatan dan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan hingga Semester 1 Tahun Anggaran 2025 mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan audit dan penyelesaian temuan pengawasan tindaklanjut temuan hasil audit.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, agar dalam pelaksanaan pengawasan lebih optimal, terpadu dan sinergi sehingga didapatkan hasil pengawasan/ mekanisme kontrol yang maksimal.

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Inspektorat Kabupaten Klaten pada Semester 1 Tahun Anggaran 2025 ini tentu saja masih belum sempurna dan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, oleh karena itu upaya perbaikan akan terus kami laksanakan. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

RINGKASAN UNTUK PIMPINAN
LAPORAN PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
SEMESTER 1 TAHUN 2025

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, peran APIP adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anticorruption activities*);
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Dalam rangka melaksanakan peran-peran di atas, disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 yang telah disusun dan disahkan dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 11/700/9 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025.

Berikut ini adalah pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP Kabupaten Klaten yang berdasarkan PKPT maupun non PKPT sampai dengan Semester 1 Tahun 2025:

1. Audit Kinerja Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten akan melaksanakan Audit Kinerja pada Semester 2 Tahun 2025.
2. Audit Kepatuhan
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan Audit Kepatuhan terhadap Dana BOS SMP Negeri dan Dana Desa di Kabupaten Klaten. Terdapat 23 laporan atas pelaksanaan Audit Kepatuhan.
3. Audit Tujuan Tertentu
Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan Audit Tujuan Tertentu terhadap Probitas Audit dan Aduan Masyarakat/ Limpahan APH. Terdapat 10 laporan atas pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu.

4. Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan evaluasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Evaluasi Manajemen Risiko (MR) Tahun 2024 pada Perangkat Daerah;
- b. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Perangkat Daerah;
- c. Evaluasi Pelaksanaan Whistle Blowing System dan Saluran Pengaduan Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2025;
- d. Evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal;
- e. Evaluasi MCP Tahun 2024;
- f. Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024;
- g. Evaluasi Koordinasi APIP dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan Tahun 2024;
- h. Evaluasi Aktivitas APIP dengan Pola Koordinasi dan Komunikasi Eksternal Tahun 2024;
- i. Pengisian Data Umum Profil APIP.

Terdapat 44 laporan atas pelaksanaan evaluasi.

5. Reviu

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan reviu terhadap:

- a. Reviu Perubahan KUA PPAS Tahun 2025;
- b. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD P) 2025;
- c. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
- d. Reviu GBS/ GAP T.A. 2025;
- e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2024;
- f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2024;
- g. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) TA 2024;
- h. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah T.A. 2024;
- i. Reviu Standar Harga Satuan (SHS) Kabupaten Klaten Tahun 2026;
- j. Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific Grant*;
- k. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
- l. Reviu Data Guru Penerima Tunjangan Profesi dan Guru Penerima Tambahan Penghasilan;
- m. Reviu Data ASPAK, SISDMK, dan SATU SEHAT SISDMK alat Kesehatan

Terdapat 50 laporan atas pelaksanaan reviu.

6. Monitoring

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan monitoring terhadap:

- a. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- b. Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025;
- c. Peta Kekeabatan atas Hasil Survei Kekeabatan pada ASN di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Klaten;
- d. Pengawasan dan Pemantauan MCSP Area Pelayananana Publik terkait Penerimaan Murid Baru (SPMB);
- e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
- f. Pengawasan Serah Terima PSU.

Terdapat 74 laporan atas pelaksanaan monitoring.

7. Pendampingan

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan:

- a. Pendampingan Pengadaan CPNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
- b. Pendampingan Pengadaan PPPK di Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.

Terdapat 5 laporan atas pelaksanaan monitoring.

8. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI

Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Daerah periode Semester 1 Tahun 2025 yang telah dilaksanakannya pada 07 Juli 2025 - 17 Juli 2025, dapat kami sampaikan telah dilakukan *update* tindak lanjut pada 41 rekomendasi, hasil dari *update* diperoleh 13 rekomendasi yang diajukan ke status 1/ status sesuai oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK s.d. Semester 1 Tahun 2025 adalah 96,52%.

9. Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

Sampai dengan Semester 1 Tahun 2025 sebanyak 13 pengaduan masyarakat, dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 6, dalam proses tindak lanjut sebanyak 2, dan pengaduan yang masih dalam proses Telaah/ Audit Tujuan Tertentu sebanyak 5.

10. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

Sampai dengan semester 1 tahun 2025 telah dilaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan oleh klien dengan 74 laporan, antara lain tindak lanjut hasil audit kepatuhan, tindak lanjut hasil audit kinerja, tindak lanjut hasil audit dengan tujuan tertentu, tindak lanjut hasil evaluasi, tindak lanjut hasil reviu, tindak lanjut hasil monitoring, dan tindak lanjut hasil pendampingan.

11. Kegiatan Pengawasan lainnya

- a. Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Desa Antikorupsi;
- b. Konsultasi Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025;
- c. Pendampingan Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Pendampingan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- e. Pemantauan dan Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025;
- f. Penilaian Sekolah Berintegritas;
- g. Inspektorat *in house Training*.

Demikian ringkasan laporan pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten sampai dengan Semester 1 Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan, untuk menjadikan periksa.

Klaten, 31 Juli 2025

Inspektur Kabupaten Klaten



Agus Suprpto, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700802 199109 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Klaten
2. Wakil Bupati Klaten selaku Ketua Tim Manajemen Pengawasan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN UNTUK PIMPINAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I INFORMASI UMUM	1
BAB II HASIL PENGAWASAN	11
BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....	23
BAB IV_HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	25
BAB V_SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI.....	28
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya	9
Tabel 2. 1 Daftar Klien Audit Kepatuhan Tahun Anggaran 2024.....	11
Tabel 2. 2 Temuan Hasil Audit Dana Desa	12
Tabel 2. 3 Rekomendasi Temuan Hasil Audit Dana Desa	13
Tabel 2. 4 Temuan Hasil Audit Dana BOS	14
Tabel 2. 5 Rekomendasi Temuan Hasil Audit Dana BOS	15
Tabel 2. 6 Daftar PD Evaluasi MR Tahun 2024	16
Tabel 2. 7 Daftar PD Evaluasi SAKIP Tahun 2024	16
Tabel 2. 8 Pelaporan Gratifikasi pada UPG Tahun 2024	19
Tabel 3. 1 Rekapitulasi Tindak Lanjut BPK RI.....	23
Tabel 3. 2 Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat Daerah.....	24
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	25
Tabel 4. 2 Pengaduan Masyarakat Semester 1 Tahun 2025	25
Tabel 5. 1 Presentase Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Bagan Susunan Organisasi.....	2
--------------------------------------------	---

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI... 23

Bagan 3. 2 Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Kepatuhan APIP .24

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 AUDIT	33
LAMPIRAN 2 EVALUASI	35
LAMPIRAN 3 REVIU	37
LAMPIRAN 4 MONITORING	40
LAMPIRAN 5 PENDAMPINGAN	44

BAB I

INFORMASI UMUM

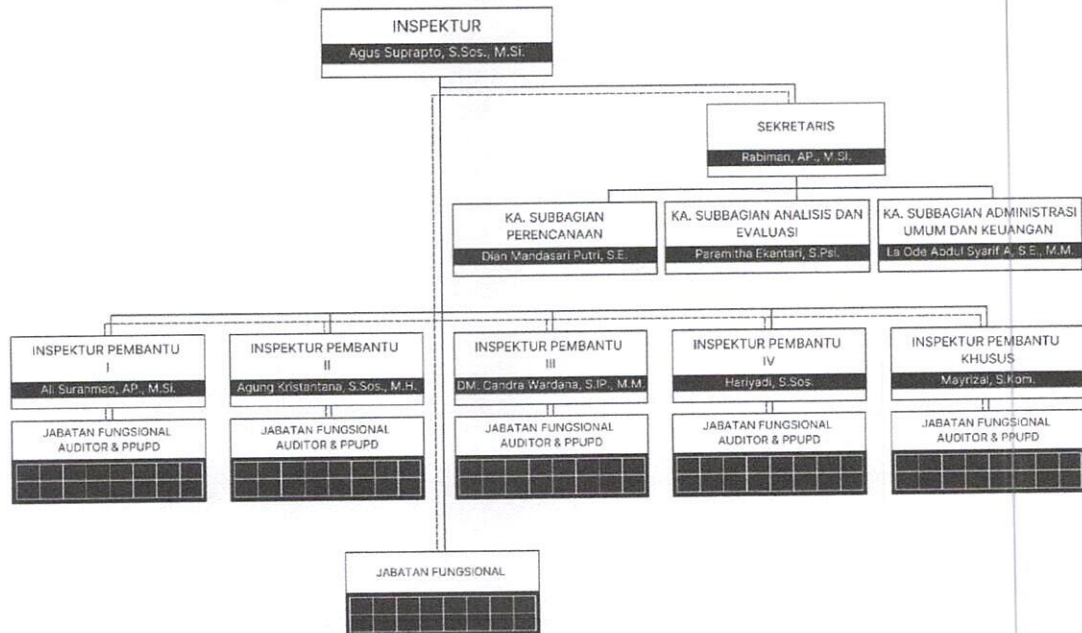
A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten;
10. Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 11/700/9 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Gambar 1. 1. Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten



Dalam melaksanakan tugas pokok, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan. Inspektur mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pendampingan dan asistensi;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah;
- c. Pengoordinasian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:
 - 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah;
 - 2) Administrasi keuangan Inspektorat Daerah;
 - 3) Administrasi barang milik daerah pada Inspektorat Daerah;
 - 4) Administrasi kepegawaian Inspektorat Daerah;
 - 5) Administrasi umum Inspektorat Daerah;
 - 6) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah

- daerah;
- 7) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- 8) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

2.1. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- b. Memfasilitasi administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta mengelola dokumentasi hukum;
- c. Memfasilitasi administrasi kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.
- d. Menyusun dokumen perencanaan Inspektorat Daerah;
- e. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- Inspektorat Daerah;
- f. Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA Inspektorat Daerah;
- g. Melakukan koordinasi dan penyusunan DPA- Inspektorat Daerah;
- h. Melakukan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- Inspektorat Daerah;
- i. Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Inspektorat Daerah; dan
- j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2.2. Subbagian Analisis dan Evaluasi

Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. Menginventarisasi hasil pengawasan;
- b. Mengkoordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. Menyusun laporan dan mendokumentasikan hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah; dan

f. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

2.3. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan

Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan ketatusahaan dan administrasi umum;
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
- i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Inspektorat Pembantu I

Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Pembantu I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan revidi laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan revidi laporan keuangan;
- h. Pelaksanaan pengawasan desa;
- i. Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;

- l. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- m. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- n. Pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- o. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Inspektorat Pembantu II

Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Inspektorat Pembantu II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan revid laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan revid laporan keuangan;
- h. Pelaksanaan pengawasan desa;
- i. Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
- l. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- m. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- n. Pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- o. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Inspektorat Pembantu III

Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Inspektorat Pembantu III menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan reviu laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- h. Pelaksanaan pengawasan desa;
- i. Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
- l. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- m. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- n. Pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- o. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

6. Inspektorat Pembantu IV

Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Inspektorat Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah;
- e. Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. Pelaksanaan reviu laporan kinerja;
- g. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;

- h. Pelaksanaan pengawasan desa;
- i. Pelaksanaan kerjasama pengawasan internal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- k. Pelaksanaan Pendampingan dan Evaluasi SAKIP;
- l. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- m. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan;
- n. Pendampingan dan asistensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- o. Pelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

7. Inspektorat Pembantu Khusus; dan

Inspektorat Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Pembantu Khusus, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- b. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan verifikasi pencegahan korupsi;
- c. Pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
- d. Pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKPN;
- e. Pelaksanaan sosialisasi, asistensi dan verifikasi pelaporan LHKASN;
- f. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi strategi nasional pencegahan korupsi;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pencegahan korupsi terintegrasi;
- i. Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan pendampingan dan evaluasi SPIP;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi peningkatan kapabilitas APIP;
- l. Pengawasan, pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian pelaksanaan program reformasi birokrasi dan pembangunan ZI;
- m. Pengkoordinasian dan fasilitasi survei penilaian integritas;
- n. Penanganan penyelesaian kerugian negara/Daerah;
- o. Pengkoordinasian pelaksanaan kerja sama dengan APH;

- p. Pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Pendampingan, asistensi dan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
- r. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- s. Penanganan pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- t. Pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin ASN;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan

Laporan Ikhtisar Hasil Pelaporan Semester 1 Tahun 2025 ini disusun dalam rangka penyajian data kepada pemimpin organisasi (Bupati) dan pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan evaluasi dan pengambilan keputusan atas kebijakan pemerintah daerah yang akan ditetapkan pada tahun-tahun selanjutnya.

D. Program Pengawasan dan Realisasinya

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan program kerja pengawasan hingga semester 1 tahun 2025, berikut ini capaian PKPT dan Non PKPT sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1
Program Kerja Pengawasan dan Realisasinya
Berdasarkan PKPT dan Non PKPT
Semester 1 Tahun 2025

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Non PKPT	Jumlah Laporan (4 + 6)
		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase (%)		
1	2	3	4	5	6	7
A	Audit					
	- Kinerja	8	0	0,00	0	0
	- Kepatuhan	81	23	28,40	0	23
	- ADTT	37	10	27,03	0	10
B	Evaluasi	125	41	32,80	3	44
C	Reviu	179	48	26,82	2	50
D	Monitoring	81	58	71,60	16	74
E	Pendampingan	121	0	0,00	5	5
	Jumlah	632	180	28,48	26	198

Keterangan:

- a. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan
- b. ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu

E. SUMBER DAYA

Gambaran sumber daya yang dimiliki adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp25.049.029.625,00. Pada April 2025 ditetapkan perubahan APBD Kabupaten Klaten menjadi Rp21.873.631.589,00 sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.091.704.837.282,00. Pada April 2025 ditetapkan perubahan APBD Kabupaten Klaten menjadi Rp3.051.458.442.282,00 sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Daerah dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
- c. Jumlah pegawai sebanyak 52 orang yang terdiri dari:
 - 1) Kualifikasi Pendidikan
 - a) S-2 : 19 Orang
 - b) S-1 : 14 Orang
 - c) D-3 : 17 Orang
 - d) SLTA : 2 Orang
 - 2) Pangkat dan Golongan
 - a) Pejabat Struktural : 8 orang
 - b) JFT Auditor : 34 orang
 - c) JFT PPUPD : 4 orang
 - d) JFT Pranata Komputer : 1 orang
 - e) JFT Arsiparis : 1 orang
 - f) JFU Penelaah Teknis Kebijakan : 2 orang
 - g) JFU Pengadministrasi Perkantoran : 2 orang
- d. Cakupan Pengawasan:
 - OPD sebanyak 51;
 - Kecamatan sebanyak 26;
 - Kelurahan sebanyak 10;
 - Desa sebanyak 391;
 - Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 1;
 - Puskesmas sebanyak 34;
 - Sekolah Dasar Negeri sebanyak 622;
 - Sekolah Menengah Pertama Negeri sebanyak 65;
 - BUMD sebanyak 5.

BAB II HASIL PENGAWASAN

Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), selain itu dilaksanakan pula kegiatan pengawasan Non-PKPT yang bersifat *mandatory*.

Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 yang telah disusun dan disahkan dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 11/700/9 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025.

A. Audit

1. Audit Kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten akan melaksanakan Audit Kinerja pada Semester 1 Tahun 2025.

2. Audit Kepatuhan

Sampai dengan semester 1 tahun 2025 telah dilaksanakan 23 audit kepatuhan berupa audit dana BOS dan audit dana desa dengan nilai yang diawasi sebesar Rp20.804.633.412,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Daftar Klien Audit Kepatuhan
Tahun Anggaran 2024

No	Klien	No	Klien
1	Desa Panggang, Kemalang	13	Desa Kebon, Bayat
2	Desa Sumberejo, Klaten Selatan	14	Desa Tegalrejo, Bayat
3	Desa Pacing, Wedi	15	Desa Sidorejo, Kemalang
4	Desa Sembung, Wedi	16	SMP Negeri 1 Cawas
5	Desa Kendalsari, Kemalang	17	SMP Negeri 2 Cawas
6	Desa Bulan, Wonosari	18	SMP Negeri 1 Wonosari
7	Desa Prawatan, Jogonalan	19	SMP Negeri 2 Wonosari
8	Desa Sumyang, Jogonalan	20	SMP Negeri 3 Delanggu
9	Desa Teloyo, Wonosari	21	SMP Negeri 4 Delanggu
10	Desa Jurangjero, Karangnom	22	SMP Negeri 3 Karangdowo
11	Desa Kaligayam, Wedi	23	SMP Negeri 1 Tulung
12	Desa Jiwowetan, Wedi		

Audit Dana Desa

Dilaksanakan 15 audit kepatuhan berupa audit dana desa dengan nilai yang diawasi sebesar Rp14.988.075.709,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Temuan Hasil Audit Dana Desa
Tahun Anggaran 2024

	Kode Temuan	Temuan	Rekomendasi	
			Jumlah	Nilai (Rp)
1	Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan	56	74	531.160.655,00
1	1.01.00 Kerugian negara/ daerah atau kerugian negara/ daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/ daerah	24	33	323.321.893,00
	1.01.02 Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	2	2	55.903.333,00
	1.01.04 Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	8	13	159.009.093,00
	1.01.05 Pemahalan harga (mark up)	2	2	7.813.284,00
	1.01.09 Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	10	12	67.241.090,00
	1.01.11 Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	2	4	33.265.093,00
2	1.02.00 Potensi kerugian negara/ daerah atau kerugian negara/ daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/ daerah	0	0	0
3	1.03.00 Kerugian penerimaan negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah	15	16	51.113.762,00
	1.03.01 Penerimaan negara/ daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah	15	16	51.113.762,00
4	1.04.00 Administrasi	17	25	156.815.000
	1.04.01 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	16	23	0
	1.04.03 Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	1	2	156.815.000
5	1.05.00 Indikasi tindak pidana	0	0	0
2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	11	24	0
1	2.01.00 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	2	2	0
	2.01.01 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	2	2	0
2	2.02.00 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	3	10	0
	2.02.03 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	1	3	0
	2.02.04 Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/ APBD	2	7	0

Kode Temuan			Temuan	Rekomendasi	
				Jumlah	Nilai (Rp)
3	2.03.00	Kelemahan struktur pengendalian intern	6	12	0
	2.03.02	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan optimal atau tidak ditaati	2	4	0
	2.03.05	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	4	8	0
3	Temuan 3E		5	5	29.170.000
1	3.01.00	Ketidakhematan/ pemborosan/ ketidakekonomisan	3	3	29.170.000
	3.01.01	Pengadaan barang/ jasa melebihi kebutuhan	3	3	29.170.000
2	3.02.00	Ketidakefisiensinan	0	0	0
3	3.03.00	Ketidakefektifan	2	2	0
	3.03.01	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan	2	2	0
JUMLAH			72	103	560.330.655,00

Tabel 2. 3
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Dana Desa
Tahun Anggaran 2024

No	Kode Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
1	Penyetoran ke kas negara/ daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat	46	44,66	560.330.655,00
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMD/D, dan masyarakat	0	0	0
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses Pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	0	0	0
4	Penghapusan barang milik negara/ daerah	0	0	0
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	2	1,94	0
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/ kelengkapan administrasi	37	35,92	0
7	Perbaikan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan	0	0	0
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung system pengendalian	0	0	0
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	16	15,53	0
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	0	0	0
11	Korodinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	0	0	0
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	0	0	0
13	Pelaksanaan sosialisasi	0	0	0
14	Lain-lain	2	1,94	0
JUMLAH		103	100	560.330.655,00

Audit Dana BOS

Dilaksanakan 8 audit kepatuhan berupa audit dana BOS SMP Negeri dengan nilai yang diawasi sebesar Rp5.816.557.703,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Temuan Hasil Audit Dana BOS
Tahun Anggaran 2024

	Kode Temuan	Temuan	Rekomendasi	
			Jumlah	Nilai (Rp)
1	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	29	38	185.352.608,00
1	1.01.00 Kerugian negara/ daerah atau kerugian negara/ daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/ daerah	14	22	147.217.257,00
	1.01.01 Belanja dan/ atau pengadaan barang/ jasa fiktif	2	2	7.144.300,00
	1.01.03 Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang negara/ daerah	3	7	4.925.400,00
	1.01.04 Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1	1	42.420.154,00
	1.01.05 Pemahalan harga (mark up)	4	6	25.254.311,00
	1.01.09 Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	4	6	449.000,00
2	1.02.00 Potensi kerugian negara/ daerah atau kerugian negara/ daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/ daerah	2	2	0
	1.02.04 Pembelian aset yang berstatus sengketa	2	2	0
3	1.03.00 Kerugian penerimaan negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah	5	5	20.434.165,00
	1.03.01 Penerimaan negara/ daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/ diterima/ disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/ daerah	5	5	20.434.165,00
4	1.04.00 Administrasi	8	9	17.701.186,00
	1.04.01 Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid)	6	7	0
	1.04.07 Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undanganbidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll	2	2	17.701.186,00
5	1.05.00 Indikasi tindak pidana	0	0	0
2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	0	0	0
1	2.01.00 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	0	0	0
2	2.02.00 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	0	0	0
3	2.03.00 Kelemahan struktur pengendalian intern	0	0	0
3	Temuan 3E	1	1	4.900.000,00
1	3.01.00 Ketidakhematan/ pemborosan/ ketidakekonomisan	1	1	4.900.000,00
	3.01.03 Pemborosan keuangan negara/ daerah/ Perusahaan atau kemahalan harga	1	1	4.900.000,00
2	3.02.00 Ketidakefisienan	0	0	0
3	3.03.00 Ketidakefektifan	0	0	0
JUMLAH		30	39	190.252.608,00

Tabel 2. 5
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Dana BOS
Tahun Anggaran 2024

No	Kode Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai (Rp)
1	Penyetoran ke kas negara/ daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat	23	58,97	190.252.608,00
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMD/D, dan masyarakat	0	0	0
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses Pembangunan atau penggantian barang/ jasa oleh rekanan	0	0	0
4	Penghapusan barang milik negara/ daerah	0	0	0
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	0	0	0
6	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/ kelengkapan administrasi	12	30,77	0
7	Perbaikan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan	0	0	0
8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung system pengendalian	0	0	0
9	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	4	10,26	0
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	0	0	0
11	Korodinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	0	0	0
12	Pelaksanaan penelitian oleh Tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	0	0	0
13	Pelaksanaan sosialisasi	0	0	0
14	Lain-lain	0	0	0
JUMLAH		39	100	190.252.608,00

3. Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu dengan jumlah laporan sampai dengan semester 1 tahun 2025 sebanyak 10 laporan, antara lain:

- a. Audit Tujuan Tertentu Probitas Audit;
- b. Audit Tujuan Tertentu Investigasi Aduan Masyarakat/ Limpahan APH.

B. Evaluasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan sebanyak Evaluasi dengan jumlah laporan sampai dengan semester 1 tahun 2025 sebanyak 44 laporan evaluasi, antara lain:

1. Evaluasi Pelaksanaan Whistle Blowing System dan Saluran Pengaduan Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2025;
2. Evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal;
3. Evaluasi MCP Tahun 2024;
4. Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024;

5. Evaluasi Manajemen Risiko (MR) Tahun 2024 pada Perangkat Daerah

Tabel 2. 6
Daftar PD Evaluasi MR Tahun 2024

No	Perangkat Daerah
1	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6	Dinas Perhubungan
7	Dinas Lingkungan Hidup
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
9	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
10	Dinas Pendidikan
11	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13	Kecamatan Kalikotes
14	Kecamatan Jatinom
15	Kecamatan Delanggu
16	Kecamatan Jogonalan
17	Kecamatan Trucuk
18	Kecamatan Klaten Selatan
19	Bagian Umum Sekretariat Daerah

6. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Perangkat Daerah:

Tabel 2. 7
Daftar PD Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Perangkat Daerah
1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Dinas Lingkungan Hidup
4	Inspektorat Daerah
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Sekretariat Daerah
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
11	Dinas Kesehatan
12	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Kecamatan Juwiring
17	Kecamatan Klaten Selatan

7. Evaluasi Koordinasi APIP dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan Tahun 2024;
8. Evaluasi Aktivitas APIP dengan Pola Koordinasi dan Komunikasi Eksternal Tahun 2024;
9. Pengisian Data Umum Profil APIP.

C. Reviu

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan reviu dengan jumlah laporan selama tahun 2024 sebanyak 50 laporan reviu, antara lain sebagai berikut:

1. Reviu Perubahan KUA PPAS Tahun 2025;
2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD P) 2025;
3. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026;
4. Reviu *Gender Budget Statement (GBS)/ Gender Analysis Pathway (GAP)* T.A. 2025;
5. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA 2024;
6. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2024;
7. Reviu Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2024;
8. Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah T.A. 2024;
9. Reviu Standar Harga Satuan (SHS) Kabupaten Klaten Tahun 2026;
10. Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) *Specific Grant*;
11. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
12. Reviu Data Guru Penerima Tunjangan Profesi dan Guru Penerima Tambahan Penghasilan dalam Rangka Perhitungan Pembayaran THR dan Gaji 13 untuk Guru ASN;
13. Reviu Data ASPAK, SISDMK, dan SATU SEHAT SISDMK alat Kesehatan

D. Monitoring

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan monitoring dengan jumlah laporan sampai dengan semester 1 tahun 2025 sebanyak 74 laporan monitoring, antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
2. Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025;

3. Peta Kekerabatan atas Hasil Survei Kekerabatan pada ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten;
4. Pengawasan dan Pemantauan MCSP Area Pelayanan Publik terkait Penerimaan Murid Baru (SPMB);
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
6. Pengawasan Serat Terima PSU.

E. Pendampingan

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan pendampingan dengan jumlah laporan sampai dengan semester 1 tahun 2025 sebanyak 5 laporan pendampingan, antara lain sebagai berikut:

1. Pendampingan Pengadaan CPNS di Pemerintah Daerah Kab. Klaten;
2. Pendampingan Pengadaan PPPK di Pemerintah Daerah Kab. Klaten.

- **Rekapitulasi Laporan Hasil Pengawasan pada huruf A - E terinci dalam lampiran laporan ini.**

F. Kegiatan Pengawasan Lainnya

1. Pemberantasan Korupsi Terintegrasi melalui aplikasi MCP (Korsupgah) yang dapat diakses melalui *jaga.id*.

Nilai Korsupgah KPK Kabupaten Klaten pada tahun 2024 adalah 96,37%. Inspektorat Daerah secara aktif melakukan koordinasi dan monitoring untuk pemenuhan indikator-indikator pada area intervensi antara lain: Area Perencanaan, Area Penganggaran, Area Pengadaan Barang Jasa, Area Pelayanan Publik, Area Pengawasan AP/IP, Area Manajemen ASN, Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Area Optimalisasi Pajak Daerah.

2. Pengendalian Gratifikasi

a. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diundangkan di Klaten pada tanggal 9 April 2021 merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

b. Sosialisasi

Berikut adalah upaya-upaya Sosialisasi gratifikasi yang telah direncanakan dan sebagian telah dilaksanakan:

i. Surat Edaran Bupati

Sosialisasi Surat Edaran Bupati Klaten tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten juga secara masif dilakukan di berbagai media elektronik dan media sosial di seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten.

ii. Sosialisasi Tatap Muka

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten memiliki Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang melakukan Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi di lingkungan Kabupaten Klaten.

c. Pelaporan Gratifikasi

Inspektorat Daerah selaku Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) menerima laporan dan menindaklanjuti melalui *website* <https://gol.kpk.go.id/> dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 8
Pelaporan Gratifikasi pada UPG Tahun 2024

No	Tanggal Laporan	Status Laporan	Taksiran Nilai (Rp)
1	26-03-2025	Selesai: Milik Negara (SK Penetapan)	370.000
2	28-05-2025	Selesai: Milik Negara (SK Penetapan)	100.000

3. Penanganan Benturan Kepentingan

Sebagai pedoman dan kerangka acuan bagi ASN pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Penanganan benturan kepentingan merupakan bagian dari reformasi birokrasi, oleh karena itu, sosialisasi mengenai benturan kepentingan ini dilaksanakan bersamaan dengan upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten.

4. *Wistleblowing system* (WBS)

Untuk memberikan pedoman bagi ASN yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti-bukti tentang suatu penyimpangan yang berindikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan indikasi penyimpangan tersebut kepada Pemerintah Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Wistleblowing System*). Salah satu media pelaporan melalui *website* bisa diakses di <https://wbs.klaten.go.id/>.

Sosialisasi mengenai WBS telah dilaksanakan secara periodik. WBS merupakan bagian dari reformasi birokrasi, oleh karena itu, sosialisasi mengenai WBS ini dilaksanakan bersamaan dengan upaya penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten.

5. Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T)

Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat Daerah dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (penjaminan mutu) oleh tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024 nomor PE.09.03/LHP-402/PW12/3/2024 tanggal 20 Desember 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah 3,098 atau Level 3 (Terdefinisi).

6. Peningkatan Kapabilitas APIP

Telah dilakukan proses pemenuhan 6 elemen yakni elemen pengelolaan SDM, elemen praktik profesional, elemen akuntabilitas dan manajemen kinerja, elemen budaya dan hubungan organisasi, elemen struktur tata kelola, dan elemen peran dan layanan APIP.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor PE.09.03/LHE-215/PW12/6/2024 Tanggal 9 Agustus 2024, hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 adalah 3,22 atau Level 3.

7. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas oleh KPK tahun 2025 dilaksanakan bulan Agustus-Oktober 2025. Survei ini diisi oleh responden internal (pegawai ASN dan non ASN sesuai kriteria responden yang telah ditentukan oleh KPK), eksternal (pengguna layanan dan perusahaan penyedia jasa), dan eksper (pemangku kepentingan).

Berdasarkan hasil penilaian SPI tahun 2024 oleh KPK, tim SPI Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten membuat strategi agar dapat meningkatkan nilai SPI tahun 2025 pemerintah kabupaten Klaten, dengan melaksanakan Survei Penilaian Integritas Internal bagi pegawai ASN dan non ASN serta bagi pengguna layanan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Klaten. Dalam 1 semester ini, tim SPI Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melakukan 2 kali SPI internal, yaitu periode 1 (Bulan Mei-Juni) yang mana responden yang mengisi survey adalah pegawai ASN dan non ASN serta pengguna layanan, kemudian periode 2 (Juli) yang mana responden yang mengisi survey adalah hanya pegawai ASN dan non ASN.

Berdasarkan hasil penilaian SPI tahun 2024 oleh KPK, tim SPI Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten juga telah menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian KPK, dan sampai dengan semester 1 ini telah melaksanakan rencana aksi diantaranya 1) Sosialisasi Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, 2) Penegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, serta adanya gratifikasi/suap, 3) Melaksanakan Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi, 4) Melakukan sosialisasi perbup nomor 78 tahun 2022 tentang mutasi dan promosi jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Klaten, 5) Sosialisasi dan kampanye terkait

benturan kepentingan sesuai Perbup Klaten Nomor 77 tahun 2019 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah kabupaten Klaten, 6) Peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas oleh KPK tahun 2025, Tim SPI Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah mengirimkan data responden internal, eksternal, dan eskper melalui website yang telah disediakan oleh KPK, serta melaksanakan sosialisasi pelaksanaan SPI KPK Tahun 2025 agar berjalan lebih optimal.

8. Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Kegiatan Saber Pungli di Kabupaten Klaten dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 700/ 76 tahun 2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 700/ 75 tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemerintah Kabupaten Klaten.

Kemudian terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dimana dengan terbitnya Peraturan Presiden tersebut, maka Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dibubarkan karena keberadaanya sudah tidak efektif.

BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

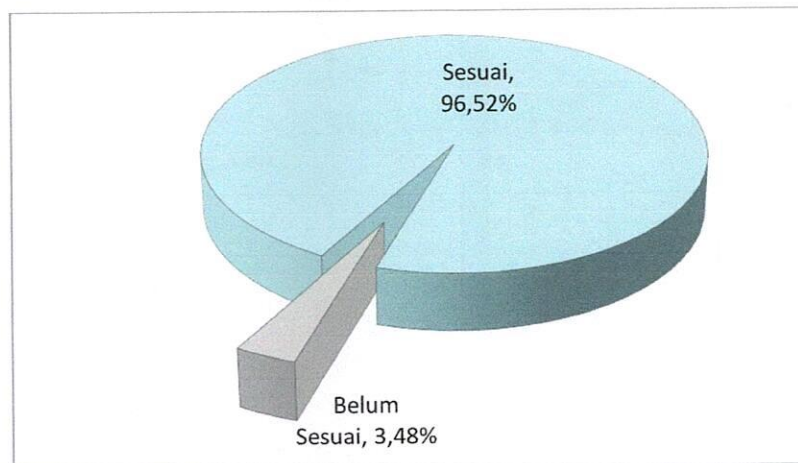
Berdasarkan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/ daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/ atau pejabat lain pada kementerian negara/ lembaga/ pemerintah daerah.

Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Daerah periode Semester 1 Tahun 2025 yang telah dilaksanakannya pada 07 Juli 2025 - 17 Juli 2025, dapat kami sampaikan rekapitulasi pemutakhiran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Rekapitulasi Tindak Lanjut BPK RI
s.d. Semester 1 Tahun 2025

Status Rekomendasi	Sebelum Pemutakhiran	Update TL	Sesudah Pemutakhiran	
			Jumlah	Persentase
1	2	3	4 (2+3)	5
Sesuai	903	13	916	96,52%
Belum Sesuai/ Dalam Proses	46	(13)	33	3,48%

Bagan 3. 1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI



Pada pembahasan dan pemutakhiran semester ini telah dilakukan update tindak lanjut 41 rekomendasi, hasil *update* diperoleh 13 rekomendasi yang diajukan ke status 1/ status sesuai oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK s.d. Semester 1 Tahun 2025 adalah 96,52%.

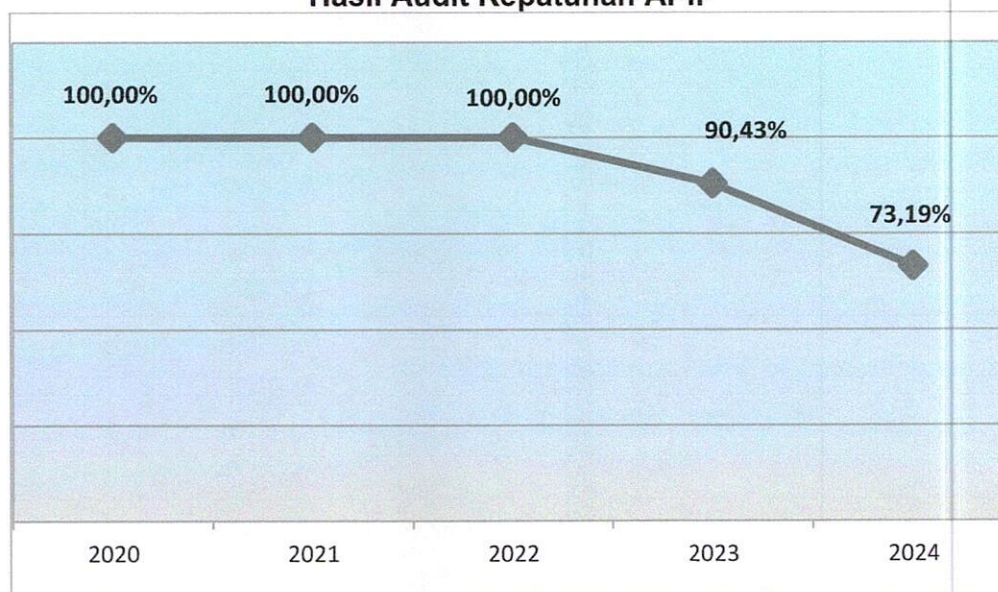
B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP

Rincian atas status pemantauan tindak lanjut hasil Audit Kepatuhan APIP disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2
Rekapitulasi Tindak Lanjut APIP Inspektorat Daerah
s.d. Semester 1 Tahun 2025

NO	TAHUN	TINDAK LANJUT			
		REKOMENDASI	SESUAI	SALDO	%
1	2021	244	244	0	100
2	2022	312	312	0	100
3	2023	294	294	0	100
4	2024	460	416	44	90,43
5	2025	138	101	37	73,19
Jumlah		1.448	1.367	81	94,41

Bagan 3. 2 Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Audit Kepatuhan APIP



Tindak Lanjut atas rekomendasi APIP tersebut akan selalu diupdate dalam laporan tiap semesternya.

BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Penanganan Pengaduan Masyarakat di Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten mempedomani Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten, sampai dengan semester 1 tahun 2025 terdapat 13 pengaduan masyarakat, dengan jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 6, dalam proses tindak lanjut sebanyak 2, dan pengaduan yang masih dalam proses Telaah/ Audit Tujuan Tertentu sebanyak 5.

Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat sampai dengan semester 1 tahun 2025 berdasarkan sumber pengaduannya, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 4. 1
Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
Semester I Tahun 2025**

No	Sumber Pengaduan	Masih dalam Proses Telaah/ Audit Tujuan Tertentu	Status Tindak Lanjut			Total
			Dalam Proses	Selesai		
				Benar	Tidak Benar/ Tidak Perlu Ditindaklanjuti	
1	Perseorangan	2	1	1	3	7
2	Badan Hukum	0	1	0	0	1
3	Limpahan Diskominfo	1	0	2	0	3
4	Limpahan APH	2	0	0	0	2
5	SP4N – LAPOR	0	0	0	0	0
						13

**Tabel 4. 2
Pengaduan Masyarakat Semester 1 Tahun 2025**

No	Pelapor	Jenis Pengaduan dan Materi Aduan	Telaah dan Pemeriksaan Khusus	Status Pengelolaan Pengaduan	Status Tindak Lanjut		
					Dalam Proses	Selesai	
				Benar		Tidak Benar/ Tidak Perlu Ditindaklanjuti	
1	Pelapor: Sdr.S Surat Tgl 14-01-2025	Jenis Pengaduan: Pengaduan Berkadar Pengawasan Materi Aduan: Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa	Telaah Staf: - Ya - Kesimpulan: Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus Audit Tujuan Tertentu: - Ya	Status Pengelolaan: Selesai (73 hari kalender)	✓		

No	Pelapor	Jenis Pengaduan dan Materi Aduan	Telaah dan Pemeriksaan Khusus	Status Pengelolaan Pengaduan	Status Tindak Lanjut		
					Dalam Proses	Selesai	
						Benar	Tidak Benar/ Tidak Perlu Ditindak Lanjuti
2	Pelapor: YLBH KKS Surat Tgl 15-01-2025	Jenis Pengaduan: Pengaduan Berkadar Pengawasan Materi Aduan: Dugaan Pelanggaran Kode Etik	Telaah Staf: - Ya - Kesimpulan: Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus Audit Tujuan Tertentu: - Ya	Status Pengelolaan Aduan: Selesai (63 hari kalender)	✓		
3	Pelapor: Sdr.JM Surat Tgl 25-02-2025	Jenis Pengaduan: Pengaduan Berkadar Pengawasan Materi Aduan: Dugaan Gratifikasi	Telaah Staf: - Ya - Kesimpulan: Tidak perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus karena sudah terjawab dengan klarifikasi oleh Tim Penelaah Pengaduan	Status Pengelolaan Aduan: Selesai (14 hari kalender)			✓
4	Pelapor: Limpahan Diskominfo (Kanal LapoGub dengan pelapor Anonim) Surat Tgl 03-03-2025	Jenis Pengaduan: Pengaduan Berkadar Pengawasan Materi Aduan: Dugaan Praktik Pungutan Liar	Telaah Staf: - Ya - Kesimpulan: Tidak perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus karena sudah terjawab dengan klarifikasi oleh Tim Penelaah Pengaduan	Status Pengelolaan Aduan: Selesai (8 hari kalender)		✓	
5	Pelapor: Limpahan Polres Klaten Surat Tgl 17-03-2025	Jenis Pengaduan: Pengaduan Berkadar Pengawasan Materi Aduan: Dugaan Tindak Pidana Korupsi	Telaah Staf: Langsung ditangani Irbansus Audit Tujuan Tertentu: Dalam Proses	Status Pengelolaan Aduan: Dalam Proses			
6	Pelapor: Anonim (mengatasnamakan Anggota BPD beserta Masyarakat) Surat Tgl 15-05-2025	Jenis Pengaduan: Pengaduan Berkadar Pengawasan Materi Aduan: Dugaan Tindak Pidana Korupsi	Telaah Staf: - Ya - Kesimpulan: Ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus Audit Tujuan Tertentu: Dalam Proses	Status Pengelolaan Aduan: Dalam Proses			
7	Pelapor: Sdr. RS Surat Elektronik Tgl 21-05-2025	Jenis Pengaduan: Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan Materi Aduan: Laporan tentang informasi yang minim terkait pengelolaan BUMDES	Hasil Telaah: - FAQ dari tim telaah melalui surel - Kesimpulan: Tidak perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus	Status Pengelolaan Aduan: Selesai (2 hari kalender)			✓

No	Pelapor	Jenis Pengaduan dan Materi Aduan	Telaah dan Pemeriksaan Khusus	Status Pengelolaan Pengaduan	Status Tindak Lanjut		
					Dalam Proses	Selesai	
						Benar	Tidak Benar/ Tidak Perlu Ditindak Lanjuti
8	Pelapor: Sdr. RS Surat Elektronik Tgl 23-05-2025	Jenis Pengaduan: Pengaduan Berkadar Pengawasan Materi Aduan: Dugaan adanya praktik pungutan	Telaah Staf: - Ya - Kesimpulan: Tidak perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus	Status Pengelolaan Aduan: Selesai (11 hari kalender)		✓	
9	Pelapor: Limpahan Diskominfo (Kanal LapoGub dengan pelapor Anonim) Surat Tgl 26-05-2025	Jenis Pengaduan: Pengaduan Berkadar Pengawasan Materi Aduan: Dugaan adanya praktik pungutan	Telaah Staf: - Konfirmasi Awal - Klarifikasi - Kesimpulan: Tidak perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus karena sudah terjawab dengan klarifikasi oleh Tim Penelaah Pengaduan	Status Pengelolaan Aduan: Selesai (53 hari kalender)		✓	
10	Pelapor: Limpahan Diskominfo (Kanal LapoGub dengan pelapor Anonim) Surat Tgl 26-05-2025	Jenis Pengaduan: Pengaduan Berkadar Pengawasan Materi Aduan: Dugaan Penyalahgunaan Bantuan	Telaah: Dalam Proses				
11	Pelapor: Sdr. RS Surat Tgl 02-06-2025	Jenis Pengaduan: Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan Materi Aduan: Dugaan Pelanggaran Komitmen	Telaah: Dalam Proses				
12	Pelapor: Sdr. W Surat Elektronik Tgl 12-06-2025	Jenis Pengaduan: Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan Materi Aduan:	Telaah: - FAQ dari tim telaah melalui surel pada tanggal 17 Juli 2025 - Kesimpulan: Tidak perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus	Status Pengelolaan Aduan: Selesai (5 hari kalender)			✓
13	Pelapor: Limpahan Kejaksaan Negeri Klaten Tgl 02-07-2025	Jenis Pengaduan: Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan Materi Aduan: Dugaan Perusakan Lingkungan Hidup	Telaah: - Audit Tujuan Tertentu: Dalam Proses				

BAB V

SIMPULAN, HAMBATAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Pada tahun 2025 ini, proses tata kelola pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten telah terlaksana sampai dengan periode semester 1 tahun 2025.

Dari tahun ke tahun, Inspektorat Daerah berusaha melakukan penyesuaian dan perbaikan kinerja pengawasan berdasarkan hasil identifikasi hambatan serta rekomendasi yang tercantum dalam dokumen Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan, mulai dari penyesuaian terhadap hambatan internal dan juga hambatan eksternal dalam proses pengawasan intern. Salah satunya adalah, Inspektorat Daerah saat ini sedang dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Klaten Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagai Langkah penyesuaian pembagian tugas fungsi pada Inspektorat Pembantu sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 107 tahun 2017 Pasal 12 ayat 2. Selain itu, pada tahun 2025 ini Inspektorat Daerah berusaha melakukan perbaikan serta mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Klaten dan juga fokus memperbanyak kegiatan sosialisasi dan pendampingan sebagai salah satu langkah preventif terhadap tindak korupsi dan dalam rangka penegakan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan, maka semua direncanakan dalam PKPT tahun 2025, dan akan dilakukan penyesuaian pada perubahan PKPT 2025. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih tetap terdapat beberapa kendala dan perlu dilakukan evaluasi serta perbaikan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan berbagai jenis pengawasan, baik Audit, Evaluasi, Monitoring, Reviu dan Pendampingan selama periode semester 1 tahun 2025, yang akan disajikan datanya melalui tabel – tabel berikut:

Tabel 5. 1
Presentase Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan
s.d. Semester 1 Tahun 2025

No	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Non PKPT	Jumlah Laporan (4 + 6)
		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase (%)		
1	2	3	4	5	6	7
A	Audit					
	- Kinerja	8	0	0,00	0	0
	- Kepatuhan	81	23	28,40	0	23
	- ADTT	37	10	27,03	0	10
B	Evaluasi	125	41	32,80	3	44
C	Reviu	179	48	26,82	2	50
D	Monitoring	81	58	71,60	16	74
E	Pendampingan	121	0	0,00	5	5
	Jumlah	632	180	28,48	26	198

Keterangan:

- a. Realisasi pengawasan diisi berdasarkan jumlah laporan hasil pengawasan yang diterbitkan
- b. ADTT = Audit Dengan Tujuan Tertentu

B. Hambatan:

1. Hambatan Internal :

- a. Pembagian tugas fungsi pada Inspektorat Pembantu belum sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 107 tahun 2017 Pasal 12 ayat 2 bahwa pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- b. Jumlah fungsional auditor dan fungsional PPUPD belum sesuai dengan kebutuhan pada anjab/ABK, sehingga capaian kegiatan pengawasan kurang maksimal.
- c. Belum semua auditor dan PPUPD mendapatkan diklat guna meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pengawasan.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan.

2. Hambatan Eksternal :

- a. Belum semua pengelola keuangan memiliki kompetensi yang memadai, terutama pengelola keuangan desa.

- b. Kebijakan mutasi / promosi pegawai membuat proses pengawasan berjalan tidak sesuai target waktu, dikarenakan perubahan *person in charge* di instansi klien sehingga harus ada *transfer knowledge* ulang.
- c. Belum terlaksananya Manajemen Risiko (MR) pada tingkat strategis Pemda dan tingkat strategis OPD sehingga pengendalian intern belum maksimal. Hal tersebut membuat perencanaan pengawasan di Inspektorat juga belum dapat dibuat berdasarkan hasil evaluasi kematangan Manajemen Risiko (MR) strategis Pemda dan OPD.
- d. Adanya penugasan baru yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan dan belum tertuang pada PKPT, serta belum tersedia petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis atas penugasan tersebut.

C. Saran :

1. Melakukan penyesuaian pembagian tugas dan fungsi sesuai dengan aturan Permendagri nomor 107 tahun 2017.
2. Melakukan peningkatan kualitas serta kuantitas pejabat fungsional auditor dan PPUPD sesuai dengan kebutuhan pada anjab/ABK.
3. Mendorong pelaksanaan manajemen risiko pada tingkat pemerintah daerah dan OPD, agar pengawasan bisa lebih efektif dan efisien karena keterbatasan sumber daya pengawasan.
4. Peningkatan komitmen pimpinan dan seluruh ASN untuk perbaikan serta peningkatan sistem pengendalian internal dan implementasi budaya antikorupsi
5. Perencanaan pengawasan dan penganggaran difokuskan pada dampak hasil pelaksanaan pengawasan, sehingga perbaikan tata kelola dan akuntabilitas dapat ditingkatkan.
6. Optimalisasi dukungan teknologi informasi untuk membantu tugas-tugas pengawasan seperti penggunaan aplikasi sistem informasi pengawasan daring (*online*) yang terintegrasi.
7. Melaksanakan evaluasi SOP Pemantauan Tindak Lanjut dan koordinasi pemantauan tindak lanjut secara berkala.
8. Memperkuat dan memperbanyak aktivitas konsultasi dan aktivitas antikorupsi sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah.

D. Tindak Lanjut atas Saran

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Klaten Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagai Langkah penyesuaian pembagian tugas fungsi pada Inspektorat Pembantu sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 107 tahun 2017 Pasal 12 ayat 2.
2. Pelaksanaan diklat untuk pejabat fungsional auditor dan PPUPD sesuai dengan kebutuhan pada anjab/ ABK.
3. Pelaksanaan sosialisasi penyusunan register risiko OPD sebagai salah satu tahapan dalam mendorong pelaksanaan manajemen risiko pada tingkat pemerintah daerah dan OPD.
4. Pengembangan aplikasi Sistem Pengawasan Intern dan Pemantauan Tindak Lanjut (SIAP MENTAL) bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten.

Klaten, 31 Juli 2025

Inspektur Kabupaten Klaten



Agus Suprpto, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 197008021991091001

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 AUDIT

Audit Kepatuhan					
No	Judul LHP	Nomor SP	Tanggal SP	Nomor LHP	Tanggal LHP
1	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Panggang Kec. Kemalang	800.1.11.1/82/2025/11	16-01-2025	700.1.2.1/021/IR-III/3/2025/11	13-03-2025
2	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Sumberejo Kec. Klaten Selatan	800.1.11.1/80/2025/11	16-01-2025	700.1.2.1/009/IR-III/3/2025/11	14-02-2025
3	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Pacing Kec. Wedi	800.1.11.1/133/2025/11	06-02-2025	700.1.2.1/29/IR-IV/3/2025/11	27-03-2025
4	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Sembung Kec. Wedi	800.1.11.1/134/2025/11	07-02-2025	700.1.2.1/23/IR-IV/3/2025/11	23-03-2025
5	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Kendalsari Kec. Kemalang	800.1.11.1/109/2025/11	05-02-2025	700.1.2.1/019/IR-III/3/2025/11	12-03-2025
6	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Bulan Kec. Wonosari	800.1.11.1/104/2025/11	03-02-2025	700.1.2.1/017/IR-II/3/2025/11	28-02-2025
7	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Prawatan Kec. Jogonalan	800.1.11.1/102/2025/11	03-02-2025	700.1.2.1/35/IR-I/3/2025/11	30-04-2025
8	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Sumyang Kec. Jogonalan	800.1.11.1/101/2025/11	03-02-2025	700.1.2.1/27/IR-I/3/2025/11	26-03-2025
9	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Teloyo Kec. Wonosari	800.1.11.1/100/2025/11	03-02-2025	700.1.2.1/015/IR-II/3/2025/11	28-02-2025
10	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Sidorejo Kec. Kemalang	800.1.11.1/99/2025/11	03-02-2025	700.1.2.1/25/IR-III/3/2025/11	26-03-2025
11	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Kaligayam Kec. Wedi	800.1.11.1/211/2025/11	05-03-2025	700.1.2.1/31/IR-IV/3/2025/11	27-03-2025
12	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Jiwowetan Kec. Wedi	800.1.11.1/214/2025/11	05-03-2025	700.1.2.1/33/IR-IV/3/2025/11	27-03-2025
13	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Kebon Kec. Bayat	800.1.11.1/277/2025/11	09-04-2025	700.1.2.1/40/IR-II/3/2025/11	28-05-2025
14	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Tegalrejo Kec. Bayat	800.1.11.1/276/2025/11	09-04-2025	700.1.2.1/42/IR-II/3/2025/11	28-05-2025
15	Audit Dana Desa TA 2024 pada Desa Jurangjero Kec. Karanganom	800.1.11.1/389/2025/11	07-05-2025	700.1.2.1/46/IR-II/3/2025/11	18-06-2025
16	Audit Dana BOS TA 2024 SMP Negeri 2 Cawas	800.1.11.1/27/2025/11	07-01-2025	700.1.2.1/001/IR-IV/3/2025/11	06-02-2025
17	Audit Dana BOS TA 2024 SMP Negeri 1 Cawas	800.1.11.1/12/2025/11	06-01-2025	700.1.2.1/013/IR-IV/3/2025/11	18-02-2025
18	Audit Dana BOS TA 2024 SMP Negeri 1 Wonosari	800.1.11.1/24/2025/11	07-01-2025	700.1.2.1/003/IR-II/3/2025/11	06-02-2025
19	Audit Dana BOS TA 2024 SMP Negeri 2 Wonosari	800.1.11.1/23/2025/11	07-01-2025	700.1.2.1/005/IR-II/3/2025/11	06-02-2025
20	Audit Dana BOS TA 2024 SMP Negeri 4 Delanggu	800.1.11.1/61/2025/11	10-01-2025	700.1.2.1/011/IR-I/3/2025/11	17-02-2025
21	Audit Dana BOS TA 2024 SMP Negeri 3 Delanggu	800.1.11.1/72/2025/11	11-01-2025	700.1.2.1/007/IR-I/3/2025/11	14-02-2025
22	Audit Dana BOS TA 2024 SMP Negeri 3 Karangdowo	800.1.11.1/186/2025/11	04-03-2025	700.1.2.1/44/IR-III/3/2025/11	10-06-2025
23	Audit Dana BOS TA 2024 SMP Negeri 1 Tulung	800.1.11.1/188/2025/11	04-03-2025	700.1.2.1/38/IR-III/3/2025/11	14-05-2025

Audit dengan Tujuan Tertentu					
No	Judul LHP	Nomor SP	Tanggal SP	Nomor LHP	Tanggal LHP
1	Audit dengan Tujuan Tertentu atas Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Gempol, Kecamatan Karangnom pada Kegiatan Pembangunan Talud Jaringan Irigasi Desa.	800.1.11.1/112/2025/11	05-02-2025	700.1.2.1/8/SUS/2025/11	27-03-2025
2	Audit dengan Tujuan Tertentu atas Aduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh Kepala Desa Taji Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten.	800.1.11.1/130/2025/11 800.1.11.1/179/2025/11	03-02-2025 03-03-2025	700.1.2.1/6/SUS/2025/11	18-03-2025
3	Audit dengan Tujuan Tertentu atas Pengaduan Masyarakat terkait Tukar Guling Tanah Kas Desa pada Desa Tegalrejo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten	800.1.11.1/111/2025/11	05-02-2025	700.1.2.1/9/SUS/2025/11	27-03-2025
4	Laporan Hasil Audit tujuan tertentu atas dugaan penyimpangan oelh perangkat desa Kraguman kecamatan Jogonalan	800.1.11.1/127/2025/11	03-02-2025	700.1.2.4/4/SUS/2025/11	28-02-2025
5	Laporan Hasil ATT atas aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan oleh kepala desa Baran Kec Cawas Kab Klaten	800.1.11.1/6/2025/11	03-01-2025	700.1.2.4/3/SUS/2025/11	31-01-2025
6	Laporan Hasil ATT atas dugaan pelanggaran pembangunan gedung BUMDes di Desa Bolopleret, Kecamatan Juwiring	800.1.11.1/002.1/2025/11/M	06-01-2025	700.1.2.1/7/SUS/2025/11	27-03-2025
7	Audit dengan Tujuan Tertentu atas Permasalahan Perangkat Desa Banyuaeng Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten	800.1.11.1/426/2025/11	27-05-2025	700.1.2.1/15/SUS/2025/11	12-06-2025
8	Probity Audit pada Paket Kegiatan Pelebaran Jalan Ki Ageng Pemanahan oleh DPUPR	800.1.11.1/182/2025/11	04-03-2025	700.1.2.1/14/SUS/2025/11	02-06-2025
9	Probity Audit pada Paket Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bulan-Padangan Tahap Pelaksanaan oleh DPUPR	800.1.11.1/239/2025/11	12-03-2025	700.1.2.1/12/2025/11	27-05-2025
10	Probity Audit Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia pada Paket Kegiatan Pembangunan Gedung MAKO Pemadam Kebakaran oleh DPUPR	800.1.11.1/422/2025/11	05-03-2025	700.1.2.1/16/SUS/2025/11	16-06-2025

LAMPIRAN 2 EVALUASI

Evaluasi					
No	Judul LHP	Nomor SP	Tanggal SP	Nomor LHP	Tanggal LHP
1	Evaluasi MR Tahun 2024 pada BKPSDM	800.1.11.1/13/2025/11	06-01-2025	700.1.2.1/15/IR-IV/5/2025/11	17-04-2025
2	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Kecamatan Kalikotes	800.1.11.1/37/2025/11	9/01/2025	700.1.2.1/16/IR-IV/5/2025/11	21-04-2025
3	Evaluasi MR Tahun 2024 pada SatPol PP dan Pemadam Kebakaran	800.1.11.1/66/2025/11	10-01-2025	700.1.2.1/22/IR-I/5/2025/11	19-05-2025
4	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Kecamatan Jatinom	800.1.11.1/67/2025/11	10-01-2025	700.1.2.1/19/IR-I/5/2025/11	30-04-2025
5	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan	800.1.11.1/50/2025/11	09-01-2025	700.1.2.1/3/IR-I/5/2025/11	24-02-2025
6	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup	800.1.11.1/52/2025/11	09-01-2025	700.1.2.1/5/IR-I/5/2025/11	03-03-2025
7	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Disdukcapil	800.1.11.1/41/2025/11	09-01-2025	700.1.2.1/1/IR-II/5/2025/11	07-02-2025
8	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Disbudporapar	800.1.11.1/40/2025/11	09-01-2025	700.1.2.1/2/IR-II/5/2025/11	07-02-2025
9	Evaluasi MR Tahun 2024 pada BAPPERIDA	800.1.11.1/106/2025/11	03-02-2025	700.1.2.1/6/IR-II/5/2025/11	17-03-2025
10	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan	800.1.11.1/105/2025/11	03-02-2025	700.1.2.1/7/IR-II/5/2025/11	17-03-2025
11	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Kecamatan Delanggu	800.1.11.1/142/2025/11	11-02-2025	700.1.2.1/21/IR-I/5/2025/11	08-05-2025
12	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Kecamatan Jogonalan	800.1.11.1/141/2025/11	11-02-2025	700.1.2.1/18/IR-I/5/2025/11	30-04-2025
13	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Bagian Umum Setda Klaten	800.1.11.1/155/2025/11	13-02-2025	700.1.2.1/17/IR-III/5/2025/11	28-04-2025
14	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Kecamatan Trucuk	800.1.11.1/154/2025/11	13-02-2025	700.1.2.1/8/IR-III/5/2025/11	09-04-2025
15	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	800.1.11.1/194/2025/11	04-03-2025	700.1.2.1/20/IR-IV/5/2025/11	07-05-2025
16	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Disperakim	800.1.11.1/225/2025/11	07-03-2025	700.1.2.1/10/IR-II/5/2025/11	14-04-2025
17	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Diskominfo	800.1.11.1/222/2025/11	07-03-2025	700.1.2.1/11/IR-II/5/2025/11	14-04-2025
18	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Kecamatan Klaten Selatan	800.1.11.1/153/2025/11	13-02-2025	700.1.2.1/9/IR-III/5/2025/11	09-04-2025
19	Evaluasi MR Tahun 2024 pada Disperinaker	800.1.11.1/124/2025/11	06-02-2025	700.1.2.1/26/IR-IV/5/2025/11	11-06-2025
20	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada SatpolPP dan Damkar	800.1.11.1/205/2025/11	05-03-2025	700.1.2.1/42/IR-I/5/2025/11	30-06-2025
21	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada DPMPSTSP	800.1.11.1/199/2025/11	05-03-2025	700.1.2.1/27/IR-I/5/2025/11	11-06-2025
22	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada DLH	800.1.11.1/203/2025/11	05-03-2025	700.1.2.1/41/IR-I/5/2025/11	30-06-2025
23	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Inspektorat	800.1.11.1/224/2025/11	07-03-2025	700.1.2.1/23/IR-II/5/2025/11	26-05-2025
24	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Bapperida	800.1.11.1/223/2025/11	07-03-2025	700.1.2.1/34/IR-II/5/2025/11	30-06-2025
25	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Disbudporapar	800.1.11.1/244/2025/11	12-03-2025	700.1.2.1/35/IR-II/5/2025/11	30-06-2025
26	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Disdukcapil	800.1.11.1/248/2025/11	14-03-2025	700.1.2.1/24/IR-II/5/2025/11	26-05-2025
27	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah	800.1.11.1/241/2025/11	12-03-2025	700.1.2.1/30/IR-III/5/2025/11	25-06-2025
28	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Dispermasdes	800.1.11.1/238/2025/11	12-03-2025	700.1.2.1/39/IR-III/5/2025/11	30-06-2025
29	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada DKUKMP	800.1.11.1/242/2025/11	12-03-2025	700.1.2.1/33/IR-III/5/2025/11	26-06-2025
30	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan	800.1.11.1/243/2025/11	12-03-2025	700.1.2.1/40/IR-III/5/2025/11	30-06-2025
31	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada BPKPAD	800.1.11.1/245/2025/11	12-03-2025	700.1.2.1/38/IR-III/5/2025/11	30-06-2025

Evaluasi					
No	Judul LHP	Nomor SP	Tanggal SP	Nomor LHP	Tanggal LHP
32	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada BPBD	800.1.11.1/236/2025/11	12-03-2025	700.1.2.1/44/IR-III/5/2025/11	30-06-2025
33	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika	800.1.11.1/272/2025/11	09-04-2025	700.1.2.1/36/IR-II/5/2025/11	30-06-2025
34	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Disperakim	800.1.11.1/269/2025/11	09-04-2025	700.1.2.1/37/IR-II/5/2025/11	30-06-2025
35	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Kecamatan Juwiring	800.1.11.1/367/2025/11	06-05-2025	700.1.2.1/31/IR-III/5/2025/11	25-06-2025
36	Evaluasi SAKIP Tahun 2024 pada Kecamatan Klaten Selatan	800.1.11.1/377/2025/11	07-05-2025	700.1.2.1/29/IR-III/5/2025/11	24-06-2025
37	Evaluasi atas pelaksanaan MCP Kabupaten Klaten Tahun 2024	800.1.11.1/122/2025/11	06-02-2024	700.1.2.1/4/SUS/5/2025/11	24-02-2025
38	Evaluasi atas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 dan Pendampingan SPIP Terintegrasi Tahun 2025	800.1.11.1/184/2025/11	04-03-2025	700.1.2.1/14/SUS/5/2025/11	15-04-2025
39	Evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) dan saluran pengaduan lainnya di Kabupaten Klaten TW 4 Tahun 2024 dan TW I 2025	800.1.11.1/382/2025/11	07-05-2025	700.1.2.1/32/SUS/5/2025/11	25-06-2025
40	Laporan hasil survei penilaian integritas (SPI) internal bagi pegawai di pemerintah Kabupaten Klaten (responden internal)			700.1.2.1/25/SUS/5/2025/11	05-06-2025
41	LHE atas koordinasi APIP dengan pihak lain yg membrikan saran dan penjaminan tahun 2024			700.1.2.1/28/5/2025/11	11-06-2025
42	LHE aktivitas APIP dengan pola koordinasi dan komunikasi eksternal tahun 2024	-	-	700.1.2.1/43/5/2025/11	30-06-2025
43	LHP pengisian data umum/profil APIP Triwulan IV Tahun 2024			800/002.3/11/M	06-01-2025
44	LHP pengisian data umum/profil APIP Triwulan I Tahun 2025			700.1.2.1/13/SUS/5/2025/11	14-04-2025

LAMPIRAN 3 REVIU

Reviu					
No	Judul LHP	Nomor SP	Tanggal SP	Nomor LHP	Tanggal LHP
1	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang SMP Tahap III Tahun Anggaran 2024	800.1.11.1/39/2025/11	09-01-2025	700.1.2.1/6/IR-IV/4/2025/11	16-01-2025
2	Reviu Akhir Volume dan Capaian Output Kegiatan Sub Bid Penguatan Sistem Kesehatan (Metode Pembayaran Sekaligus Rekomendasi) Sumber Dana DAK Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2024	800.1.11.1/25/2025/11	07-01-2025	700.1.2.1/21/IR-I/4/2025/11	10-02-2025
3	Reviu Akhir Volume dan Capaian Output Kegiatan Sub Bid Penguatan Sistem Kesehatan (Metode Pembayaran Bertahap) Sumber Dana DAK Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2024	800.1.11.1/28/2025/11	07-01-2025	700.1.2.1/20/IR-I/4/2025/11	10-02-2025
4	Reviu atas Capaian Output dan Serapan Anggaran DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahap III Tahun Anggaran 2024	800.1.11.1/38/2025/11	09-01-2025	700.1.2.1/17/IR-IV/4/2025/11	04-02-2025
5	Reviu atas DAK Fisik Bidang Jalan Tahap III TA 2024 pada DPUPR	800.1.11.1/53/2025/11	10-01-2025	700.1.2.1/18/IR-IV/4/2025/11	07-02-2025
6	Reviu sisa DAK Fisik sampai tahun 2023 yang dibelanjakan/digunakan di TA 2024 Sub Bidang Penguatan Intervensi Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	800.1.11.1/83/2025/11	19-01-2025	700.1.2.1/19/IR-I/4/2025/11	10-02-2025
7	Reviu atas DAK Fisik Bidang Air Minum Tahap III pada DPUPR	800.1.11.1/93/2025/11	24-01-2025	700.1.2.1/11/IR-II/4/2025/11	30-01-2025
8	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Kegiatan DAK Fisik bidang sanitasi tahap III TA 2024 pada DPUPR	800.1.11.1/108/2025/11	03-02-2025	700.1.2.1/14/IR-II/4/2025/11	04-02-2025
9	Reviu laporan penggunaan sisa DAK fisik sampai tahun 2023 yang dibelanjakan di TA 2024 Bidang pendidikan di Dinas Pendidikan (SILPA DAK)	800.1.11.1/95/2025/11	24-01-2025	700.1.2.1/10/IR-IV/4/2025/11	30-01-2025
10	Reviu Keg. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian TA 2024 (Sarana Data dan Informasi BPP) pada DKPP	800.1.11.1/99/2025/11	03-02-2025	700.1.2.1/22/IR-III/4/2025/11	10-02-2025
11	Reviu atas SP2D Dana DAK Fisik Sub KB Tahun 2024 pada DissosP3APPKB	800.1.11.1/116/2025/11	05-02-2025	700.1.2.1/23/IR-II/4/2025/11	10-02-2025
12	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana keg DAK fisik Bidang irigasi Tahap III TA 2024 pada DPUPR	800.1.11.1/147/2025/11	13-02-25	700.1.2.1/24/IR-II/4/2025/11	14-02-2025
13	Reviu Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK Fisik TA 2024	-	-	700.1.2.1/27/IR-III/4/2025/11	24-02-2025
14	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan DAU SG Tahap II TA 2024 pada Kelurahan Klaten Kec Klaten Tengah	800.1.11.1/3/2025/11	03-01-2025	700.1.2.1/2/IR-IV/4/2025/11	03-01-2025
15	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan DAU SG Tahap II TA	800.1.11.1/1/2025/11	01-01-2025	700.1.2.1/1/IR-IV/4/2025/11	02-01-2025

Reviu					
No	Judul LHP	Nomor SP	Tanggal SP	Nomor LHP	Tanggal LHP
	2024 pada Kelurahan Tonggalan Kec Klaten Tengah				
16	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan DAU SG Tahap II TA 2024 pada Kelurahan Bareng Kec Klaten Tengah	800.1.11.1/2/2025/11	01-01-2025	700.1.2.1/5/IR-IV/4/2025/11	13-01-2025
17	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan DAU SG Tahap II TA 2024 pada Kelurahan Gergunung Tahun 2024	800.1.11.1/11/2025/11	06-01-2025	700.1.2.1/3/IR-IV/4/2025/11	09-01-2025
18	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan DAU SG Tahap II TA 2024 Kelurahan Jatnom Kecamatan Jatnom Kabupaten Klaten.	800.1.11.1/10/2025/11	06-01-2025	700.1.2.1/4/IR-III/4/2025/11	10-01-2025
19	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan DAU SG bidang pendidikan tahap III TA 2024 pada Disbudporapar	800.1.11.1/38/2025/11	09-01-2025	700.1.2.1/9/IR-IV/4/2025/11	22-01-2025
20	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan DAU SG Tahap II TA 2024 Kelurahan Bareng Lor Kecamatan Klaten Utara	800.1.11.1/64/2025/11	10-01-2025	700.1.2.1/12/IR-III/4/2025/11	04-02-2025
21	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan DAU SG Bid Pendidikan Tahap akhir TA 2024 pada DissosP3APPKB	800.1.11.1/63/2025/11	10-01-2025	700.1.2.1/15/IR-II/4/2025/11	04-02-2025
22	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan DAU SG Bid Pendidikan Tahap Akhir TA 2024 pada Disperinaker	800.1.11.1/70/2025/11	11-01-2025	700.1.2.1/13/IR-II/4/2025/11	04-02-2025
23	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan DAU SG Bidang Pekerjaan Umum Tahap III TA 2024 pada DPUPR	800.1.11.1/75/2025/11	13-01-2025	700.1.2.1/16/IR-II/4/2025/11	04-02-2025
24	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan DAU SG Bidang Pendidikan Tahap III TA 2024 pada Dinas Pendidikan	800.1.11.1/7/2025/11	03-01-2025	700.1.2.1/8/IR-IV/4/2025/11	22-01-2025
25	Reviu atas Laporan Realisasi Penyerapan DAU SG Bidang Pendidikan Tahap III TA 2024 pada Dispermasdes	800.1.11.1/62/2025/11	10-01-2024	700.1.2.1/25/IR-I/4/2025/11	17-02-2025
26	Reviu atas Rencana DAU SG TA 2025 Bidang Pendidikan/Kelurahan pada Kelurahan Mojayan	800.1.11.1/264/2025/11	08-04-2025	700.1.2.1/38/IR-II/4/2025/11	28-04-2025
27	Reviu atas Rencana DAU SG TA 2025 Bidang Pendidikan/Kelurahan pada Kelurahan Kabupaten	800.1.11.1/263/2025/11	08-04-2025	700.1.2.1/37/IR-II/4/2025/11	28-04-2025
28	Reviu atas Rencana DAU SG TA 2025 Bidang Pendidikan Kelurahan pada Kelurahan Tonggalan	800.1.11.1/262/2025/11	08-04-2025	700.1.2.1/36/IR-II/4/2025/11	28-04-2025
29	Reviu atas Rencana DAU SG TA 2025 Bidang Pendidikan Kelurahan pada Kelurahan Buntalan	800.1.11.1/261/2025/11	08-04-2025	700.1.2.1/35/IR-II/4/2025/11	28-04-2025
30	Reviu atas Rencana Penyerapan DAU SG Bid Pendanaan Kelurahan Gergunung thp 1 penggunaan SILPA DAU SG TA 2024 dan 2025	800.1.11.1/299/2025/11	11/04/2025	700.1.2.1/41/IR-I/4/2025/11	08-05-2025
31	Reviu atas Rencana DAU SG TA 2025 Bidang	800.1.11.1/309/2025/11	13-04-2025	700.1.2.1/40/IR-II/4/2025/11	28-04-2025

Reviu					
No	Judul LHP	Nomor SP	Tanggal SP	Nomor LHP	Tanggal LHP
	Pendidikan/Kelurahan pada Kelurahan Bareng				
32	Reviu atas Rencana DAU SG TA 2025 Bidang Pendidikan/Kelurahan pada Kelurahan Klaten	800.1.11.1/308/2025/11	13-04-2025	700.1.2.1/39/IR-II/4/2025/11	28-04-2025
33	Reviu atas Rencana DAU SG TA 2025 Bidang Kelurahan pada Kelurahan Jatinom	800.1.11.1/350/2025/11	03-05-2025	700.1.2.1/42/IR-I/4/2025/11	14-05-2025
34	Reviu atas Rencana DAU SG TA 2025 Bidang Pendidikan/Kelurahan pada Disbudporapar	800.1.11.1/410/2025/11	19-05-2025	700.1.2.1/43/IR-II/4/2025/11	21-05-2025
35	Reviu atas Rencana DAU SG TA 2025 Bidang Pendidikan pada DissosP3APPKB	800.1.11.1/381/2025/11	07-05-2025	700.1.2.1/48/IR-IV/4/2025/11	28-05-2025
36	Reviu atas Rencana DAU SG TA 2025 Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025 pada Dispersip	800.1.11.1/378/2025/11	07-05-2025	700.1.2.1/44/IR-IV/4/2025/11	22-05-2025
37	Reviu atas Rencana DAU SG TA 2025 Bidang Pendidikan pada Disdik	800.1.11.1/416/2025/11	21 Mei 2025	700.1.2.1/47/IR-II/4/2025/11	27-05-2025
38	Reviu Data Guru Penerima Tunjangan Profesi dan Guru Penerima Tambahan Penghasilan dalam Rangka Perhitungan Pembayaran THR dan Gaji 13 untuk Guru ASN Daerah TA 2025 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten	800.1.11.1/424/2025/11	24 Mei 2025	700.1.2.1/45/IR-II/4/2025/11	26-05-2025
39	Reviu terhadap GAP dan GBS Tahun 2025 pada Dispartan	800.1.11.1/49/2025/11	09-01-2025	700.1.2.1/29/IR-I/4/2025/11	25-02-2025
40	Reviu terhadap GAP dan GBS Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	800.1.11.1/81/2025/11	16-01-2025	700.1.2.1/7/IR-III/4/2025/11	17-01-2025
41	Reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Klaten	800.1.11.1/65/2025/11	10-01-2025	700.1.2.1/26/IR-I/4/2025/11	19-02-2025
42	Reviu atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 pada Kec. Jatinom	800.1.11.1/42/2025/11	09-01-2025	700.1.2.1/28/IR-I/4/2025/11	24-02-2025
43	Reviu LKJIP Kabupaten Klaten Tahun 2024	800.1.11.1/040/11/M	24-02-2025	700.1.2.1/30/IR-IV/4/2025/11	28-02-2025
44	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024	800.1.11.1/234/2025/11	12-03-2025	700.1.2.1/34/4/2025/11	25-03-2025
45	Reviu LKPD TA 2024 Kabupaten Klaten	800.1.11.1/253/2025/11	19-03-2025	700.1.2.1/33/4/2025/11	25-03-2025
46	Reviu atas Dokumen Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025	800.1.11.1/405/2025/11	16-05-2025	700.1.2.1/46/IR-IV/4/2025/11	26-05-2025
47	Reviu Data ASPAK, SISDMK, dan SATU SEHAT SISDMK alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	800.1.11.1/412/2025/11	19 Mei 2025	700.1.2.1/49/IR-III/4/2025/11	12-06-2025
48	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2026	800.1.11.1/467/2025/11	15 Juni 2025	700.1.2.1/50/IR-III/4/2025/11	17-06-2025
49	Reviu Standar Harga Satuan pada Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2026	800.1.11.1/445/2025/11	3 Juni 2025	700.1.2.1/51/SUS/4/2025/11	17-06-2025
50	Reviu KUA-PPAS Perubahan Kabupaten Klaten TA 2025	800.1.11.1/081.2/11.M	04-06-2025	700/083.1/11/M	11-06-2025

LAMPIRAN 4 MONITORING

Monitoring					
No	Judul LHP	Nomor SP	Tanggal SP	Nomor LHP	Tanggal LHP
1	Monitoring Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah di Lingkungan Pemkab Klaten th 2025 Periode Bulan Januari	800.1.11.1/8/2025/11	06-01-2025	700.1.2.7/2/IR-II/2025/11	31-01-2025
2	Monitoring Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah di Lingkungan Pemkab Klaten th 2025 Periode Bulan Februari	800.1.11.1/165/2025/11	24-02-2025	700.1.2.7/3/IR-II/2025/11	28-02-2025
3	Monitoring Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah di Lingkungan Pemkab Klaten th 2025 Periode Bulan Maret	800.1.11.1/258/2025/11	26-03-2025	700.1.2.7/36/IR-II/2025/11	27-03-2025
4	Monitoring Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah di Lingkungan Pemkab Klaten th 2025 Periode Bulan April	800.1.11.1/335/2025/11	29-04-2025	700.1.2.7/52/IR-II/2025/11	09-05-2025
5	Monitoring Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah di Lingkungan Pemkab Klaten th 2025 Periode Bulan Mei	800.1.11.1/428/2025/11	2 Juni 2025	700.1.2.7/57/IR-II/2025/11	28-05-2025
6	Monitoring Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 Bulan Juni	800.1.11.1/439/2025/11	3 Juni 2025	700.1.2.7/67/IR-II/2025/11	30-06-2025
7	Monitoring survei peta kekerabatan pada ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten	800.1.11.1/45/2025/11	09-01-2025	700.1.2.7/1/SUS/2025/11	31-01-2025
8	Monev atas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2024	800.1.11.1/175/2025/11	28-02-2025	700.1.2.1/12/SUS/5/2025/11	14-04-2025
9	Pengawasan dan Pemantauan MCSP Area Pelayanan Publik terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten	800.1.11.1/11/2025/11	12 Juni 2025	700.1.2.7/65/2025/11	20-06-2025
10	Lap hsl pengawasan serah terima PSU			700.1.2.7/66/SUS/2025/11	26-06-2025
11	TL hasil audit dana desa TA 2023 Boto Kecamatan Wonosari (LhA 2024)	800.1.11.1/4/2025/11	03-02-2025	700.1.2.5/1/IR-IV/2025/11	06-01-2025
12	TL hasil audit dana desa TA 2023 Desa wonobojo Kecamatan jogonalan (LhA 2024)	800.1.11.1/17/2025/11	06-01-2025	700.1.2.5/2/IR-III/2025/11	09-01-2025
13	TL hasil audit dana desa TA 2023 Desa Tlogo Kecamatan Prambanan (LhA 2024)	800.1.11.1/36/2025/11	08-01-2025	700.1.2.5/3/IR-III/2025/11	09-01-2025
14	TL hasil audit dana desa TA 2023 Desa Rejoso Kecamatan jogonalan (LhA 2024)	800.1.11.1/16/2025/11	06-01-2025	700.1.2.5/4/IR-III/2025/11	09-01-2025
15	TL hasil audit dana BOS TA 2023 SMPN 2 Pedan (LhA 2024)	800.1.11.1/26/2025/11	07-01-2025	700.1.2.5/5/IR-III/2025/11	09-01-2025
16	TL hasil audit dana desa TA 2023 Desa Bowan Kecamatan Delanggu (LhA 2024)	800.1.11.1/20/2025/11	07-01-2025	700.1.2.5/6/IR-III/2025/11	09-01-2025
17	TL hasil audit dana desa TA 2023 Desa Tlobong Kecamatan Delanggu (LhA 2024)	800.1.11.1/14/2025/11	06-01-2025	700.1.2.5/7/IR-III/2025/11	09-01-2025
18	TL hasil audit dana desa TA 2023 Desa Kokosan Kecamatan jogonalan (LhA 2024)	800.1.11.1/19/2025/11	06-01-2025	700.1.2.5/8/IR-III/2025/11	16-01-2025
19	TL hasil audit dana desa TA 2023 Desa titang Kecamatan jogonalan (LhA 2024)	800.1.11.1/18/2025/11	06-01-2025	700.1.2.5/9/IR-III/2025/11	16-01-2025

Monitoring					
No	Judul LHP	Nomor SP	Tanggal SP	Nomor LHP	Tanggal LHP
20	TL hasil audit dana desa TA 2023 Desa Geneng Kecamatan Prambanan (LhA 2024)	800.1.11.1/30/2025/11	07-01-2025	700.1.2.5/10/IR-III/2025/11	16-01-2025
21	TL hasil audit dana desa TA 2023 Desa Ngering Kecamatan Jogonalan (LhA 2024)	800.1.11.1/15/2025/11	06-01-2025	700.1.2.5/11/IR-III/2025/11	16-01-2025
22	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Tegalrejo Kecamatan Ceper (LhA 2024)	800.1.11.1/119/2025/11	05-02-2025	700.1.2.5/12/IR-II/2025/11	06-02-2025
23	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Ngandong Kecamatan Gantiwarno (LhA 2024)	800.1.11.1/118/2025/11	05-02-2025	700.1.2.5/13/IR-II/2025/11	06-02-2025
24	TL hasil audit dana BOS TA 2023 pada SMP N 2 Karangnongko (LhA 2024)	800.1.11.1/117/2025/11	05-02-2025	700.1.2.5/14/IR-II/2025/11	06-02-2025
25	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Glodogan Kec Klaten Selatan (LhA 2024)	800.1.11.1/47/2025/11	09-01-2025	700.1.2.5/15/IR-I/2025/11	06-02-2025
26	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Karangjoho Kecamatan Karangdowo (LhA 2024)	800.1.11.1/51/2025/11	09-01-2025	700.1.2.5/16/IR-I/2025/11	06-02-2025
27	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Karangtalun Kecamatan Karangdowo (LhA 2024)	800.1.11.1/48/2025/11	09-01-2025	700.1.2.5/17/IR-I/2025/11	06-02-2025
28	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Tawangrejo Kecamatan Bayat (LhA 2024)	800.1.11.1/125/2025/11	06-02-2025	700.1.2.5/18/IR-I/2025/11	06-02-2025
29	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Karangnongko Kecamatan Karangnongko (LhA 2024)	800.1.11.1/150/2025/11	13-02-2025	700.1.2.5/19/IR-II/2025/11	28-02-2025
30	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Cetan Kecamatan Ceper (LhA 2024)	800.1.11.1/152/2025/11	13-02-2025	700.1.2.5/20/IR-II/2025/11	28-02-2025
31	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Danguran Kecamatan Klaten Selatan (LhA 2024)	800.1.11.1/138/2025/11	07-02-2025	700.1.2.5/21/IR-I/2025/11	28-02-2025
32	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Pomah Kecamatan Tulung (LhA 2024)	800.1.11.1/139/2025/11	07-02-2025	700.1.2.5/22/IR-I/2025/11	28-02-2025
33	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Ngemplakseneng Kec Manisrenggo (LhA 2024)	800.1.11.1/159/2025/11	17-02-2025	700.1.2.5/23/IR-IV/2025/11	28-02-2025
34	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Socokangsi Kecamatan Jatinom (LhA 2024)	800.1.11.1/136/2025/11	07-02-2025	700.1.2.5/28/IR-III/2025/11	13-03-2025
35	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Krikilan Kecamatan Bayat (LhA 2024)	800.1.11.1/191/2025/11	04-03-2025	700.1.2.5/25/IR-IV/2025/11	10-03-2025
36	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Ngerangan Kecamatan Bayat (LhA 2024)	800.1.11.1/193/2025/11	04-03-2025	700.1.2.5/24/IR-IV/2025/11	07-03-2025
37	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Demakijo Kecamatan Karangnongko (LhA 2024)	800.1.11.1/240/2025/11	12-03-2025	700.1.2.5/26/IR-II/2025/11	13-03-2025
38	TL hasil audit dana BOS pada SMP Negeri 1 Wonosari	800.1.11.1/209/2025/11	05-03-2025	700.1.2.5/27/IR-II/2025/11	13-03-2025
39	TL hasil audit dana desa Delanggu Kecamatan Delanggu	800.1.11.1/220/2025/11	07-03-2025	700.1.2.5/29/IR-III/2025/11	13-03-2025
40	TL hasil audit dana desa Tibayan Kecamatan Jatinom	800.1.11.1/219/2025/11	07-03-2025	700.1.2.5/30/IR-III/2025/11	13-03-2025
41	TL hasil Audit Kinerja Stunting Tahun 2024 Tahap Pelaksanaan Pilar 3 (intervensi spesifik dan	800.1.11.1/247/2025/11	13-03-2025	700.1.2.5/31/IR-II/2025/11	14-03-2025

Monitoring					
No	Judul LHP	Nomor SP	Tanggal SP	Nomor LHP	Tanggal LHP
	sensitif dan 5 (Penguatan Data) pada DissosP3APPKB dan DPUPR Kabupaten Klaten TA 2023				
42	TL hasil audit dana BOS pada SMP Negeri 2 Wonosari	800.1.11.1/210/2025/11	05-03-2025	700.1.2.5/35/IR-II/2025/11	27-03-2025
43	TL hasil audit dana desa Gaden Kecamatan Trucuk	800.1.11.1/202/2025/11	05-03-2025	700.1.2.5/32/IR-I/2025/11	27-03-2025
44	TL hasil audit dana BOS pada SMP Negeri 3 Delanggu	800.1.11.1/201/2025/11	05-03-2025	700.1.2.5/33/IR-I/2025/11	27-03-2025
45	TL hasil audit dana desa Sabranglor Kecamatan Trucuk	800.1.11.1/227/2025/11	09-03-2025	700.1.2.5/34/IR-I/2025/11	27-03-2025
46	TL hasil audit dana BOS pada SMP Negeri 2 Cawas	800.1.11.1/273/2025/11	09-04-2025	700.1.2.5/45/IR-IV/2025/11	02-05-2024
47	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Kradenan Kecamatan Trucuk (LHA 2024)	800.1.11.1/312/2025/11	14-04-2025	700.1.2.5/38/IR-I/2025/11	28-04-2025
48	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Kemalang Kecamatan Kemalang (LHA 2024)	800.1.11.1/305/2025/11	11-04-2025	700.1.2.5/37/IR-I/2025/11	28-04-2025
49	TL hasil Audit Kinerja Stunting TA 2023 Tahap Pelaksanaan Pilar 3 Intervensi Spesifik pada Dinkes Kabupaten Klaten	800.1.11.1/304/2025/11	11-04-2025	700.1.2.5/46/IR-I/2025/11	02-05-2024
50	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Mendak Kecamatan Delanggu (LHA 2024)	800.1.11.1/310/2025/11	13-04-2025	700.1.2.5/39/IR-III/2025/11	28-04-2025
51	TL hasil audit dana desa Cawan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten	800.1.11.1/311/2025/11	13-04-2025	700.1.2.5/47/IR-III/2025/11	07-05-2025
52	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Krecek Kecamatan Delanggu (LHA 2024)	800.1.11.1/302/2025/11	11-04-2025	700.1.2.5/42/IR-III/2025/11	28-04-2025
53	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Glagah Kecamatan Jatinom (LHA 2024)	800.1.11.1/301/2025/11	11-04-2025	700.1.2.5/43/IR-III/2025/11	28-04-2025
54	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Kepanjen Kecamatan Delanggu (LHA 2024)	800.1.11.1/300/2025/11	11-04-2025	700.1.2.5/40/IR-III/2025/11	28-04-2025
55	Monitoring TL atas AOI SPIP tahun 2024	800.1.11.1/320/2025/11	16-04-2025	700.1.2.5/55/SUS/2025/11	27-05-2025
56	Monitoring TL atas AOI IEPK tahun 2024	800.1.11.1/321/2025/11	16-04-2025	700.1.2.5/56/SUS/2025/11	27-05-2025
57	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Taji Kecamatan Prambanan (LHA 2024)	800.1.11.1/319/2025/11	16-04-2025	700.1.2.5/41/IR-III/2025/11	28-04-2025
58	TL hasil audit dana BOS pada SMP Negeri 1 Cawas	800.1.11.1/329/2025/11	23-04-2025	700.1.2.5/44/IR-IV/2025/11	30-04-2025
59	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Japanan Kecamatan Cawas	800.1.11.1/390/2025/11	07-05-2025	700.1.2.5/48/IR-II/2025/11	08-05-2025
60	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Kanoman Kecamatan Karangnongko	800.1.11.1/392/2025/11	07-05-2025	700.1.2.5/49/IR-II/2025/11	08-05-2025
61	TL hasil audit dana desa TA 2024 pada Desa Teloyo Kecamatan Wonosari	800.1.11.1/385/2025/11	07-05-2025	700.1.2.5/50/IR-II/2025/11	09-05-2025
62	TL hasil audit dana desa TA 2024 pada Desa Bulan Kecamatan Wonosari	800.1.11.1/391/2025/11	07-05-2025	700.1.2.5/51/IR-II/2025/11	09-05-2025
63	TL hasil audit dana BOS pada SMP Negeri 4 Delanggu	800.1.11.1/356/2025/11	03-05-2025	700.1.2.5/53/IR-I/2025/11	27-05-2025
64	TL hasil audit dana desa TA 2023 pada Desa Tulung Kecamatan Tulung	800.1.11.1/365/2025/11	06-05-2025	700.1.2.5/54/IR-I/2025/11	27-05-2025

Monitoring					
No	Judul LHP	Nomor SP	Tanggal SP	Nomor LHP	Tanggal LHP
65	TL hasil audit Komprehensif Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Gedongjetis Kecamatan Tulung	800.1.11.1/361/2025/11	06-05-2025	700.1.2.5/63/IR-I/2025/11	16-06-2025
66	Kaligayam Wedi (LHA 2025)	800.1.11.1/434/2025/11	3 Juni 2025	700.1.2.5/58/IR-IV/2025/11	10-06-2025
67	Jiwowetan Wedi (LHA 2025)	800.1.11.1/433/2025/11	3 Juni 2025	700.1.2.5/59/IR-IV/2025/11	10-06-2025
68	Sembung Wedi (LHA 2025)	800.1.11.1/431/2025/11	3 Juni 2025	700.1.2.5/60/IR-IV/2025/11	10-06-2025
69	Pacing Wedi (LHA 2025)	800.1.11.1/432/2025/11	3 Juni 2025	700.1.2.5/61/IR-IV/2025/11	10-06-2025
70	TL Lanjutan Pemutakhiran Data TL Desa Kradenan (TA 2023) Update Mei 2025 Hasil Audit Dana Desa TA 2023 pada Desa Kradenan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten	800.1.11.1/453/2025/11	4 Juni 2025	700.1.2.5/68/IR-I/2025/11	30-06-2025
71	TL hasil temuan atas Pemeriksaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada Desa Kendalsari Kecamatan Kemalang	800.1.11.1/456/2025/11	11 Juni 2025	700.1.2.5/62/IR-III/2025/11	16-06-2025
72	Tindak Lanjut Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten	800.1.11.1/465/2025/11	12 Juni 2025	700.1.2.5/64/IR-I/2025/11	17-06-2025
73	Tindak Lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 pada Desa Mlese Kecamatan Gantiwarno	800.1.11.1/461/2025/11	11 Juni 2025	700.1.2.5/69/IR-II/2025/11	30-06-2025
74	Tindak Lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 pada Desa Sawit Kecamatan Gantiwarno.	800.1.11.1/462/2025/11	11 Juni 2025	700.1.2.5/70/IR-II/2025/11	30-06-2025

LAMPIRAN 5 PENDAMPINGAN

Pendampingan					
No	Judul LHP	Nomor SP	Tanggal SP	Nomor LHP	Tanggal LHP
1	Pelaksanaan E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi (PPG) Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024	700.1.2/009 /11/2024	04-11-2024		
2	Monitoring dan Evaluasi MCP tahun 2023, serta Sosialisasi MCP 2024	800.1.11.1 /124/11/M	05-03-2024		07-03-2024
3	Notulen Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi 17 Juli 2024				17-07-2024
4	Notulen Bimbingan Teknis Aplikasi E-Integrity oleh BPKP Provinsi DIY 19 Juni 2024				19-06-2024
5	Laporan Hasil Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024 pada RSUD Bagas Waras	000.8.6.2 /77/11	31-01-2024	700.1.2.8/002 /11/SUS-II/2024	06-03-2024
6	SE Rekapitulasi Penyampaian LHKAN			1 Tahun 2024	23-02-2024
7	Rekapitulasi Penyampaian LHKAN			700.1.2.7/1/2024/11	30-04-2024
8	Ringkasan Eksekutif Hasil Koordinasi Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pertanaman TA 2024	800.1.11.1 /466/11	25-08-2024	700.1.2.8/004 /11/IR-III/2024	30-08-2024
9	Ringkasan Eksekutif Hasil Koordinasi Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pertanaman TA 2024	800.1.11.1 /413/11.M	10-09-2024	700.1.2.8/005 /11/IR-III/2024	17-09-2024
10	Ringkasan Eksekutif Hasil Koordinasi Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pertanaman TA 2024	800.1.11.1 /543/11	20-09-2024	700.1.2.8/006 /11/IR-III/2024	24-09-2024
11	Ringkasan Eksekutif Hasil Koordinasi Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pertanaman TA 2024	800.1.11.1 /607/11	07-10-2024	700.1.2.8/008/ 11/2024	10-10-2024
12	Ringkasan Eksekutif Hasil Koordinasi Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pertanaman TA 2024	800.1.11.1 /676/11		700.1.2.8/010 /11/IR-III/2024	05-11-2024
13	Ringkasan Eksekutif Hasil Koordinasi Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pertanaman TA 2024	800.1.11.1 /705/11	08-11-2024	700.1.2.8/011 /11/IR-III/2024	14-11-2024
14	Ringkasan Eksekutif Hasil Koordinasi Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pertanaman TA 2024	800.1.11.1 /744/11	23-11-2024	700.1.2.8/013 /11/IR-III/2024	29-11-2024
15	Ringkasan Eksekutif Hasil Koordinasi Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pertanaman TA 2024	800.1.11.1 /815/11	13-12-2024	700.1.2.8/015 /11/IR-III/2024	19-12-2024
16	Ringkasan Eksekutif Hasil Koordinasi Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Dalam Rangka Peningkatan Indeks Pertanaman TA 2024	800.1.11.1 /875/11	31-12-2024	700.1.2.8/017 /11/IR-III/2024	31-12-2024
17	Laporan Pendampingan Administrasi Atas Hasil Monitoring Dan Evaluasi Dana Desa Pada Desa Birit Kecamatan Wedi Yang Bersumber Dana Desa TA. 2023			700.1.2.8/001 /11/IR-IV/2024	13-02-2024
18	Pengawasan Pengadaan CPNS Tahun 2024 Tahap Perencanaan s.d. Seleksi Administrasi	800.1.11.1 /530/11	02-09-2024	700.1.2.8/007 /11/2024	10-10-2024
19	Pengawasan Pengadaan CPNS tahun 2024 Tahap SKD dan Pengadaan PPPK Tahap Seleksi Administrasi	800.1.11.1 /685/11	01-11-2024	700.1.2.8/012 /11/2024	22-11-2024
20	Pengawasan Pengadaan PPPK tahun 2024 tahap SKD periode I	800.1.11.1 /770/11	03-12-2024	700.1.2.8/016 /11/2024	23-12-2024